

INTEGRASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK: STUDI EVALUASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

Integration Of Information Technology In The Electronic-Based Government System: An Evaluation Study At The Aceh Office Of Communication, Informatics, And Encryption

Depita Kardiati¹, Abdul Hafiz², Jamiati KN³, Yuli Santri Isma⁴, Syarifah Chairunnisak⁵, Sarrah Kurnia Fadhillah⁶, Fitria Akmal⁷

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh
Koresponding penulis : depita@unimal.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, termasuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Aceh, melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, berupaya mengimplementasikan SPBE guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum optimal, serta belum terintegrasinya berbagai aplikasi yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SPBE di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh masih menghadapi beberapa kendala utama, di antaranya: keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi teknis yang sesuai, belum optimalnya infrastruktur jaringan dan kapasitas bandwidth, serta kurangnya integrasi antar aplikasi pemerintahan yang menyebabkan duplikasi data dan ketidakefektifan layanan. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas SPBE, direkomendasikan adanya penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta integrasi sistem dan aplikasi guna menciptakan layanan digital yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Teknologi Informasi, E-Government, Pelayanan Publik, Aceh

Abstract—The development of information and communication technology has driven digital transformation in government administration, including the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). The Aceh government, through the Office of Communication, Informatics, and Encryption, strives to implement SPBE to enhance efficiency, transparency, and accountability in public services. However, its implementation still faces challenges such as limited human resources, suboptimal technological infrastructure, and a lack of integration among various applications used. This study aims to evaluate the implementation of SPBE at the Aceh Office of Communication, Informatics, and Encryption, identify the challenges encountered, and provide strategic recommendations to improve the effectiveness of the electronic-based government system at the regional level. This research employs a qualitative descriptive approach. Data was collected through interviews and direct observations. The findings indicate that the implementation of SPBE at the Aceh Office of Communication, Informatics, and Encryption still faces several major challenges, including limited human resources with adequate technical competencies, suboptimal network infrastructure and bandwidth capacity, and lack of integration among government applications, leading to data duplication and inefficient services. To enhance SPBE effectiveness, this study

recommends strengthening human resource capacity through regular training, improving information technology infrastructure, and integrating systems and applications to create more efficient and responsive digital services that cater to public needs.

Keywords: *Electronic-Based Government System, Information Technology, E-Government, Public Services, Aceh*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Digitalisasi layanan pemerintahan menjadi suatu kebutuhan dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai strategi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sebagai bagian dari implementasi SPBE di daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh memiliki peran penting dalam mengembangkan dan mengelola layanan pemerintahan berbasis digital. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, SPBE diharapkan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat proses administrasi, serta memberikan layanan publik yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah telah mengatur pelaksanaan SPBE melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menekankan pentingnya integrasi layanan digital dalam sektor pemerintahan. Namun, dalam implementasinya, penerapan SPBE di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi teknis di bidang TIK, keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan dan kapasitas bandwidth, serta kurangnya integrasi antar aplikasi yang menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan data dan layanan. Kendala-kendala ini berdampak pada efektivitas SPBE dalam

memberikan layanan pemerintahan yang optimal kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SPBE di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan SPBE serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi SPBE dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Aceh.

II. STUDI PUSTAKA

2.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE Pasal 1 ayat (1) bahwa “Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE”. Transformasi e-government menuju e-governance dalam proses pelayanan publik memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan adaptasi teknologi yang berkelanjutan (Yudhiantara, 2019). “Transformasi digital dalam sistem pemerintahan tidak hanya menuntut kesiapan teknologi, tetapi juga sumber daya manusia yang kompeten dan regulasi yang mendukung keberlanjutan implementasinya” (Kardiati, 2025). “Penerapan pelayanan publik berbasis e-government melalui aplikasi tertentu dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan kepada masyarakat” (Suryani, 2021). Menurut Mulyana (2023) “Penggunaan e-government pada pelayanan publik ditujukan untuk memberikan pelayanan secara penuh pada masyarakat dalam bentuk penyampaian informasi dan layanan yang lebih efisien”.

2.2 Teori Organisasi

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Sukarman Purba et al. (2020), struktur organisasi merupakan “sistem berupa jaringan kerja yang mencakup tugas-tugas, sistem pelaporan hingga komunikasi yang mengaitkan pekerjaan secara individual bersama-sama dengan kelompok”. Organisasi terdiri dari berbagai individu yang bekerja sama dalam suatu sistem terstruktur guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Daft (2021), organisasi adalah “sekelompok orang yang bekerja bersama dalam struktur yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dapat berbentuk formal maupun informal, tergantung pada tujuan dan mekanisme operasional yang diterapkan”.

2.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan dampak, efektivitas, dan efisiensi kebijakan tersebut.” (Dunn, 2020). Menurut Bardach dalam Sedermayanti (2020) “Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-

kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan”. Menurut Mulyadi dalam Hamalik (2013) bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan, sehingga evaluasi kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu.

2.4 Sumber Daya Manusia

“Sumber daya manusia merupakan potensi salah satu aset yang berfungsi sebagai modal di dalam berbagai bisnis organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi yang lebih nyata secara fisik maupun non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi” (Idris, 2016). Menurut Robbins dalam Enifah (2012: 186) bahwa “kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari keberhasilan peningkatan kemampuan teoritis, peningkatan kemampuan teknis, peningkatan kemampuan konseptual, peningkatan moral dan peningkatan keterampilan teknis”.

III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

a. Aplikasi Umum

Aplikasi Umum yang digunakan pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh merupakan Aplikasi SPBE yang sama, standar, berdasarkan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Aplikasi umum dari instansi pusat pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh diantaranya Aplikasi MANTRA, SIMAYA, PNSMAIL, PNSBox, Srikandi, SP4N-LAPOR, SI-ASN, JDIH dan esr.menpan.go.id., e-Office, e-Planning, e-Budgeting, e-Monev, LPSE, e-Perijinan Layanan, e-Pengaduan dan Layanan e-Kepegawaian. Aplikasi umum pemerintah daerah pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh diantaranya wbs.acehprov.go.id, SIM-PPID, Aplikasi Presensi Face Recognition, E-Surat, siudin.acehprov.go.id, aset.acehprov.go.id, dan simanja.acehprov.go.id. Kendala penggunaan Aplikasi umum disebabkan oleh belum optimalnya Jangkauan infrastruktur TIK di wilayah Aceh khususnya jaringan telekomunikasi yang belum stabil dan belum menyeluruh menyebabkan proses penggunaan aplikasi umum menjadi berulang-ulang, sulit untuk diakses sehingga penggunaan aplikasi umum menjadi kurang optimal.

b. Aplikasi Khusus

Aplikasi khusus yang digunakan pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh menjadi sarana yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan dan kebutuhan layanan masyarakat, namun Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh saat ini belum mampu melakukan pembangunan aplikasi baru karena keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki

kemampuan dan pendalaman kompetensi teknis yang kurang memadai, kendala penerapan jangkauan infrastruktur TIK di wilayah Aceh yang belum optimal, terbatasnya anggaran untuk membangun aplikasi, belum lagi biaya pengelolaannya, serta biaya *maintenance* yang mahal. Namun Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh telah mampu melakukan pengembangan beberapa aplikasi khusus sebagai upaya dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pemerintahan dan masyarakat aceh diantaranya pengembangan aplikasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi) Aplikasi khusus tersebut merupakan pengembangan dari Aplikasi PPID versi sebelumnya dan sampai dengan saat ini selain sudah berbasis website juga telah dikembangkan berbasis android. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh juga telah melakukan pengembangan tanda tangan digital pada aplikasi e-surat. Melakukan pengembangan pada Website Gampong dengan domain gampong.id, dan aplikasi lainnya. Kendala dalam mengembangkan aplikasi khusus yaitu terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis TIK yang memadai, kapasitas bandwidth belum memadai dan masih terjadi perbedaan yang cukup besar (gap) di antara perangkat daerah dan transaksi layanan SPBE.

4.2. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh

a. Layanan Administrasi SPBE

Layanan administrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh diterapkan dengan didukung adanya aplikasi yang mempermudah kegiatan layanan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh seperti www.lapor.go.id, e-Procurement, JDIH, PPID dan esr.menpan.go.id. dan aplikasi lainnya yang dapat mempermudah aktivitas kegiatan layanan

administrasi mencakup aktivitas yang saling berkaitan seperti pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen tata kelola pemerintah sehingga sangat membantu dan dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya. dan cepat dalam proses pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi umum meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja sehingga dapat mempermudah dan mendorong akuntabilitas penyelenggara layanan administrasi dalam mengelola sumber-sumber daya publik dan mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program, mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik, mudah untuk di evaluasi dan dapat dikembangkan.

b. Layanan Publik SPBE

Layanan publik sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi umum dan pengembangan aplikasi khusus masih berjalan kurang efektif. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan jaringan telekomunikasi di wilayah Aceh yang belum optimal dan menyeluruh menyebabkan masyarakat tidak menggunakan aplikasi dalam mendapatkan pelayanan publik. Masyarakat mendatangi langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Penerapan layanan publik sistem pemerintahan

berbasis elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh dengan berkoordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan telah berjalan namun masih belum optimal dikarenakan kapasitas bandwidth belum memadai dan masih terjadi perbedaan yang cukup besar (*gap*) di antara perangkat daerah dan transaksi layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan. Sehingga interoperabilitas pelayanan publik belum berjalan maksimal.

V. KESIMPULAN

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh telah menunjukkan berbagai upaya dalam meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui digitalisasi. Berbagai aplikasi umum dan khusus telah dikembangkan untuk mendukung administrasi pemerintahan dan layanan publik. Namun, penerapan SPBE masih menghadapi berbagai kendala, antara lain, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) – Jumlah tenaga ahli di bidang teknologi informasi masih terbatas, sehingga pengembangan dan pengelolaan aplikasi belum optimal, Infrastruktur teknologi yang belum memadai, keterbatasan jaringan telekomunikasi dan kapasitas bandwidth di Aceh menyebabkan gangguan akses terhadap layanan digital, kurangnya Integrasi Sistem, masih terdapat kesenjangan interoperabilitas antara berbagai aplikasi dan layanan, yang berdampak pada inefisiensi dalam pertukaran data, serta minimnya sosialisasi dan promosi mengenai layanan SPBE menyebabkan rendahnya pemanfaatan aplikasi digital oleh masyarakat, yang masih lebih memilih layanan konvensional. Meskipun demikian, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh terus berupaya mengatasi kendala ini dengan melakukan pengembangan dan perbaikan layanan berbasis digital, termasuk

pengembangan berbagai aplikasi. Rekomendasi penelitian ini meliputi

1. Peningkatan Kapasitas SDM – Perlu dilakukan pelatihan dan rekrutmen tenaga ahli di bidang teknologi informasi guna meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan SPBE.
2. Penguatan Infrastruktur Teknologi – Pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam peningkatan jaringan telekomunikasi dan kapasitas *bandwidth* guna memastikan layanan SPBE dapat diakses secara optimal.
3. Integrasi sistem yang lebih baik – Diperlukan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan interoperabilitas antara berbagai aplikasi pemerintahan guna menghindari duplikasi sistem dan mempercepat layanan.
4. Sosialisasi dan edukasi – Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat dan cara penggunaan layanan digital agar pengguna layanan lebih aktif memanfaatkan layanan SPBE.
5. Evaluasi dan Monitoring Berkala – Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas SPBE serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.
Dengan mengatasi berbagai kendala tersebut, implementasi SPBE di Aceh dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan publik secara digital.

REFERENSI

- [1] Dunn, W. N. (2020). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (6th ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [2] Enifah, Y. (2012). *Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan*. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, 6(2), 180–190.
- [3] Hamalik, O. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [4] Herlina, S. (2019). *Efektivitas penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik*. Universitas Muhammadiyah Makassar Digital Library.
- [5] Idris, M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi dan Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- [6] Kardiati, D. (2025). *Implementasi Sistem E-Procurement di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh: Tantangan dan Strategi Optimalisasi*. Perspektif Administrasi Publik dan Hukum, 2(1), 183–189.
- [7] Komisi Informasi Pusat. (2025). *Laporan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 Provinsi se-Indonesia*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat.
- [8] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- [9] Mulyadi, D. (2013). *Evaluasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- [10] Mulyana, R. (2023). *Peran e-government dalam pelayanan publik: Penyampaian informasi dan layanan yang lebih efisien*. ResearchGate.
- [11] Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2022). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning* (4th ed.). New York: Routledge.
- [12] Purba, S., & Sihombing, P. (2020). *Struktur Organisasi dan Efektivitas Kerja*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- [13] Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2012). *Organizational Behavior* (15th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- [14] Sedarmayanti. (2016). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- [15] Sedarmayanti. (2020). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.

- [16] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [17] Suryani, T. (2021). *Penerapan pelayanan publik berbasis e-government melalui aplikasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi*. Retrieved from <https://jurnal.unpad.ac.id>.
- [18] Scott, W. R., & Davis, G. F. (2021). *Organizations and organizing: Rational, natural, and open system perspectives*. Routledge.
- [19] Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [20] Yudhiantara, I. N. (2019). *Transformasi E-Government Menuju E-Governance dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 19(1), 15–27.